

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan di Minangkabau disebut istilah *Bundo Kanduang*. *Bundo Kanduang* memiliki peranan penting bertugas membagi dan menjaga harta pusaka, selain itu penarikan garis keturunan berdasarkan keturunan ibuMatrilinial. Peranan perempuan sangat memberi pengaruh terhadap bidang sosial, ekonomi dan politik. Meskipun secara budaya perempuan di Minangkabau indenitik dengan Limpapeh Rumah Gadang hal ini tidak menjadi penghambat sebuah perjuangan perempuan dalam berbagai bidang.

Ada beberapa tokoh perempuan yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Sumatera Barat antara lain Mesra dari partai Gerindra, Siti Izzati Azis dari partai Golkar, Yunisra Syahiran dari partai Gerindra dan Leli Arni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<sup>1</sup> Nama-nama tersebut adalah tokoh perempuan yang berhasil terpilih dan ditetapkan untuk duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari keempat tokoh perempuan tersebut yang berasal dari selatan provinsi Sumatera Barat yaitu Leli Arni.

Melihat dari lingkungan yang ada di sekitarnya Leli Arni aktif dalam berbagai organisasi terutama dalam organisasi perempuan yang ada pada lingkup tempat Leli Arni tinggal. Beberapa organisasi perempuan yang Leli Arni ikuti antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), Bundo Kanduang, Wanita Islam,

---

<sup>1</sup>Mario Sofia Nasution, "KPU Jumlah Anggota DPRD Sumbar Perempuan Berkurang" Diakses dari <https://m.antaranews.com/berita/1010684/kpu-jumlah-anggota-dprd-sumbar-berkurang>, pada 25 agustus 2021 pukul 22.45.

dan sebagai bendahara Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) kecamatan Sungai Rumbai.<sup>2</sup> Sebagai perempuan yang aktif dalam berorganisasi mengantarkan Leli Arni menjadi tokoh perempuan yang terlibat langsung dalam Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang melahirkan kabupaten Dharmasraya.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru pada Tahun 1998, maka masuklah ke masa reformasi yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan sikap sendiri. Kebijakan ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.<sup>3</sup> Dampak dari keluarnya Undang-Undang tersebut terjadinya peningkatan pemekaran wilayah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia salah satunya pada Provinsi Sumatera Barat. Dari beberapa daerah yang ada pada provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan pemekaran salah satunya Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Tuntutan pemekaran wilayah juga terlaksana di daerah selatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Sepakat membentuk wilayah pemekaran, yakni Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.<sup>4</sup> Kabupaten Dharmasraya berdiri pada tanggal 7 Januari tahun 2004 dengan empat kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai. Lahirnya Kabupaten Dharmasraya ini tentunya merupakan sesuatu yang bukan karena kebetulan saja,

---

<sup>2</sup> *Daftar Riwayat Hidup Leli Arni.*

<sup>3</sup>*Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*

<sup>4</sup>*Undang-Undang No Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003*

namun karena adanya sebuah usaha dan kerja sama yang baik yang dilakukan masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah ini.<sup>5</sup> Salah seorang tokoh masyarakat yang memiliki peranan dalam proses pemekaran ini adalah Leli Arni.

Di dalam proses pemekaran para tokoh dan masyarakat sepakat membentuk kepengurusan pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang di beri nama Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung atau disingkat dengan (BP2KSS).<sup>6</sup> Pada tanggal 16 Juni 2002 diadakan pertemuan di ruangan pertemuan Kantor Pengairan Sedasi Pulau Punjung maka terebentuklah susunan pengurus BP2KSS disusunlah kepanitiaan yang terdiri dari beberapa tokoh mulai dari penasehat Hasan Zaini yang menjabat sebagai wakil bupati Sijunjung dan seluruh anggota DPRD kabupaten Sawahlunto/Sijunjung wilayah selatan dan pada saat di parlemen pusat dibantu pengurusannya tersebut oleh Dt Labuan dan beberapa penasehat yang dibentuk Syafruddin, Maas Rajo Lelo, Ali anas Dt Labuan, Zubir Sutan Bagindo. Pada pengurus intinya BP2KSS terdiri antara lain Adigunawan, Haris Tuanku Sati, Syamsuir Sulaiman, Masrigi, Hendri, Leli Arni, Masrul Maas, Rasul Hamidi, Kapidis Rasyid.<sup>7</sup> Dari sembilan tokoh tersebut Leli Arni merupakan satu-satunya tokoh perempuan yang ikut berjuang dan terlibat langsung dalam Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (BP2KSS) yang melahirkan Kabupaten Dharmasraya.

Selain Leli Arni seorang perempuan, Leli Arni juga merupakan seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif. Pada saat Leli Arni ikut serta

---

<sup>5</sup>Mursidawati, "Hasan Zaini Dalam Kancan Akademik dan Politik 1976-2010", *Skripsi* (Padang: Jurusan Pendidikan Sejarah STIKIP PGRI Sumatera Barat, 2012). Hlm. 60.

<sup>6</sup> Nasution, "Pemekaran Wilayah Sumatera Barat: Studi Tentang Pemekaran Kabupaten Dharmasraya 1999-2005", *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2009) Hlm. 38.

<sup>7</sup>Enzo Ortega, "Kepemimpinan Adi Gunawan Sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya 2010-2015", *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah FIB Universitas Andalas, 2019) Hlm. 42.

dalam kepanitiaan (BP2KSS), Leli Arni menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Koto Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pada kepanitiaan tersebut ada sebuah keunikan tersendiri, Leli Arni satu-satunya perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terlibat langsung dalam kepanitiaan Badan Persiapan Pemekaran. Meskipun Leli Arni berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil di dalam pemerintahan kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tidak menutupi keinginannya dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap pemekaran.<sup>8</sup>

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Leli Arni seringkali mendapat tekanan dari atasannya untuk tidak ikut serta dalam badan ke panitiaan tersebut, bahkan Leli Arni sering dikecam akan di nonjobkan dari jabatannya. Namun dengan semua tekanan tersebut tidak menyurutkan niatnya ikut serta dalam panitia pemekaran. Di sinilah keberanian yang membedakan Leli Arni dengan pegawai negeri sipil lainnya.<sup>9</sup>

Dalam Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (BP2KSS) Leli Arni di percaya sebagai sekretaris pada panitia Badan Persiapan Pemekaran tersebut. Pada peristiwa pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Leli Arni menunjukkan dirinya sebagai perempuan yang memegang teguh keberanian. Hal ini dilihat dari keberaniannya dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dalam lingkungan pekerjaan. Leli Arni juga seorang yang pandai membaca situasi politik.

Mengawali karirnya sebagai guru sekolah dasar dengan prestasi dan terobosannya mengantarkan Leli Arni menjadi kepala Ranting Dinas Pendidikan

---

<sup>8</sup>Wawancara Hendri M.si 26 Juni 2021 di Dharmasraya.

<sup>9</sup>Wawancara Leli Arni 8 September 2021 di Padang .

di Kecamatan Koto Baru dan Sungai Rumbai dan dipercayai kembali menjadi kepala cabang Dinas Pendidikan Koto Baru pada tahun 1999. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kegigihan seorang Leli Arni dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Sama halnya dengan perempuan pada umumnya selain menjalankan tugas sebagai pegawai negeri, Leli Arni juga menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Leli Arni harus pandai membagi waktu antara kehidupan rumah tangganya dan pekerjaannya. Ketika ia menjadi panitia dalam pemekaran tersebut, tanggung jawab pekerjaannya tidak pernah tinggal, meskipun ia harus menahan rasa lelah antara membagi waktu antara pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan menjadi panitia dalam Badan Persiapan Pemekaran tersebut.<sup>10</sup>

Ikut sertanya Leli Arni dalam Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (BP2KSS) menjadi Kabupaten Dharmasraya didasari atas kemauannya sendiri. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Leli Arni atas ikut serta dalam memperjuangkan persiapan pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Alasan Yang pertama kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten Sawahlunto/Sijunjung terhadap masyarakat yang ada di wilayah selatan kabupaten Dharmasraya sekarang, hal ini dilihat ketidakterjangkauan pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan penduduk.<sup>11</sup> Yang kedua Jarak tempuh yang cukup jauh dari Kecamatan Koto Baru menuju ke pusat Ibu Kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, menempuh waktu yang cukup lama

---

<sup>10</sup>Wawancara Hamisis 22 September 2021 di Koto Baru Dharmasraya.

<sup>11</sup>Nasution, *op.cit.*, hlm. 10

sekitaran 2 jam perjalanan sehingga menjadi polemik yang terjadi dalam masyarakat yang melakukan kepentingan dengan instansi pemerintah daerah yang ada di ibu kota kabupaten.

Dalam momen pemekaran Sawahlunto/Sijunjung ada suatu alasan tersendiri atas ikut sertanya Leli Arni dalam kepanitiaan pemekaran, yaitu rasa dikucilkan yang sering kali dirasakan oleh seorang Leli Arni terutama dalam pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. pada saat perjalanan dinas Leli Arni berkunjung ke pusat pemerintahan sering kali merasakan kejanggalan terutama dalam kepentingan dinas.<sup>12</sup>

Leli Arni sebagai salah satu putri daerah yang berkiprah dalam proses pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, hanya ingin meperjuangkan untuk membentuk Kabupaten sendiri. perjuangan yang dilakukan selama menjadi panitia dalam persiapan pemekaran sama sekali atas panggilan hati nuraninya, sebagai putri daerah yang ingin memajukan tanah kelahiran dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Terbukti dari perjalanan karirnya setelah terjadinya pemekaran tersebut, Leli Arni tetap mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2016 Leli Arni dipercayai sebagai pegawai negeri sipil yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) di pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya. Dilantik sebagai sekretaris daerah atas dasar prestasinya dalam menyumbangkan pemikiran dan tenaga terhadap kemajuan kabupaten Dharmasraya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara Leli Arni 8 September 2021 di Padang .

<sup>13</sup> Humas, "Adlisman Resmi dilantik Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah", diakses dari <http://dharmasrayakab.go.id/berita/308/adlisman-resmi-dilantik-sebagai-penjabat-sekretaris-daerah.html>, pada 19 februari 2021 pukul 10.23 wib

Pada Tahun 2018 memasuki masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai sekretaris daerah Leli Arni terjun ke dunia politik.<sup>14</sup> Pada tahun 2019 Leli Arni mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Leli Arni satu-satunya perempuan terpilih yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya, sehingga mengantarkannya di bangku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.<sup>15</sup>

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul **“LELI ARNI: PEREMPUAN DI RANAH POLITIK DARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2002-2019”**

Penelitian sejarah dalam bentuk Biografi tentang Leli Arni menarik untuk di kaji, pertama Leli Arni adalah satu-satunya tokoh perempuan yang ikut berjuang dan terlibat langsung dalam kepanitiaan Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang melahirkan Kabupaten Dharmasraya. kedua Leli Arni adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Koto Baru dan berani ikut berpartisipasi dalam Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang melahirkan Kabupaten Dharmasraya sedangkan pada masa itu Pegawai Negeri mendapat tekanan dari pemerintah daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung agar tidak terlibat dalam kegiatan Pemekaran. Ketiga Leli Arni adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang terjun ke dunia Politik

---

<sup>14</sup>Syaiful Anif, “Leli Arni Pensiun, Bupati Sutan Riska Lantik Adlisman Sebagai PLT Sekda Dharmasraya” diakses dari <https://Minangsatu.com/Leli-Arni-Pensiun-Bupati-Sutan-Riska-Lantik-Adlisman-Sebagai-Plt-Sekda-Dharmasraya-1222>, pada 20 Februari 2021 pukul 11.30 Wib.

<sup>15</sup>Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 60/HK. O3. 1-Kpt/13/KPU-Prov/VII/2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

dan terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan dan mempertegas permasalahan dalam penulisan, maka diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Leli Arni?
2. Apa yang menyebabkan berani Leli Arni ikut dalam Badan PersiapanPemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung?
3. Apa saja peran Leli Arni sebelum dan setelah Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung?
4. Mengapa Leli Arni memutuskan untuk terjun ke ranah politik?

Batasan temporal dari tulisan ini adalah 2002-2019. Tahun 2002 menjadi batasan awal dikarenakan pada tahun ini Leli Arni ikut serta dalam kepanitiaian Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (BP2KS). Batasan akhir penulisan ini adalah 2019, karena pada tahun inilah Leli Arni terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera barat. Batasan Spasialnya dari penulisan ini adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung setelah di mekarkan menjadi Kabupaten Dharmasraya karena disinilah Leli Arni memulai karirnya sampai terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara spesifik tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Menguraikan latar belakang kehidupan Leli Arni

2. Mendeskripsikan Alasan Leli Arni ikut dalam Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
3. Menjelaskan peran Leli Arni sebelum dan setelah Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
4. Menganalisis alasan Leli Arni terjun ke dunia politik

Manfaat dari penelitian ini agar masyarakat dan generasi berikutnya mengetahui, dan mengingat serta menghargai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para tokoh pemekaran. Penulisan mengenai Biografi Leli Arni ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelajaran dan informasi untuk para akademisi, peneliti dan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Penulisan Pustaka**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkontribusi terhadap penelitian ini berupa buku, jurnal, makalah, skripsi dan tesis yang penulis temukan. Adapun penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini diantaranya:

Jurnal “Perempuan dan Politik” yang di tulis oleh Zaenal Mukarom, sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapatkan jabatan politik di klasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah perempuan karena memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu misalnya suaminya eksekutif sedangkan Istrinya Legislatif. Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam

membesarkan anak-anaknya. Kelompok ketiga perempuan yang aktif dalam dunia ormas, LSM dan organisasi dimana tempat dia belajar.<sup>16</sup>

Jurnal “Perempuan dan Perspektif Gender Dalam Penulisan Sejarah Indonesia” yang ditulis oleh Dias Pradadimara, Jurnal Universitas Hasanudin, Vol, 14, No. 1. 2019 meningkatnya perhatian pada perempuan dalam penulisan sejarah telah melahirkan berbagai karya tentang perempuan ataupun seorang tokoh dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Revolusi Perancis atau perjuangan anti kolonialisme.<sup>17</sup>

Skripsi “Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat: Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya 1999-2005” yang ditulis oleh Nasution, Skripsi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang 2009. Yang menjelaskan pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang melalui proses pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.<sup>18</sup>

Skripsi “Kepemimpinan Adi Gunawan Sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015” yang di tulis oleh Enzo Ortega, skripsi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang 2019. Yang menjelaskan perjalanan karir Adi Gunawan menjadi seorang ketua pada Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung hingga terjunnya ke dunia politik yang mengantarkannya menjadi Bupati Kabupaten Dharmasraya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Zaenal Mukarom, “Perempuan dan Politik” *Jurnal UIN Gunung Djati Volume 9, No. 2 Desember 2008*.

<sup>17</sup> Dias Pradadimara, “Perempuan dan Perspektif Gender dalam Penulisan Sejarah Indonesia”, *Jurnal Universitas Hasanudin Volume 14, No. 1. 2019*.

<sup>18</sup>Nasution, “Pemekaran Wilayah Sumatera Barat: Studi Tentang Pemekaran Kabupaten Dharmasraya 1999-2005”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2009).

<sup>19</sup>Enzo Ortega, “Kepemimpinan Adi Gunawan Sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya 2010-2015”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Sejarah FIB Universitas Andalas, 2019).

Skripsi “ Hasan Zaini Dalam Kanca Akademik dan Politik 1967-2010” yang ditulis oleh Mursidawati, skripsi pendidikan sejarah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan(STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang 2012. Yang menjelaskan perjalanan karir Hasan Zaini dalam kanca akademik hingga politik. Perjalanan karirnya dalam bidang politik yaitu berawal dari anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan termasuk salahsatu tokoh pemekaran kabupaten Dharmasraya.<sup>20</sup>

Penelitian sejarah dalam bentuk Biografi tentang biografi Leli Arni menarik untuk dikaji. Tulisan mengenai tentang tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya memang sudah ada menulis namun sejauh ini yang penulis ketahui belum ada penulis lainnya yang menulis biografi Leli Arni secara khusus. Maka penelitian ini memang pantas untuk diteliti sehingga penulis mengangkat dengan judul **“LELI ARNI: PEREMPUAN DI RANAH POLITIK DARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2002-2019”**

### **E. Kerangka Analisis**

Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitunya kata *bios* yang berarti hidup atau kehidupan dan kata *grapieren* yang berarti menulis atau tulisan. Jadi biografi adalah tulisan tentang hidup atau kehidupan seseorang yang dalam bahasa sehari-harinya disebut dengan riwayat hidup.<sup>21</sup> Penulisan Biografi merupakan suatu Usaha untuk menggambarkan atau memperkenalkan seseorang melalui kisah hidupnya. Biografi adalah suatu bentuk penulisan yang berusaha mengungkapkan

---

<sup>20</sup> Mursidawati, “Hasan Zaini Dalam Kanca Akademik dan Politik 1976-2010”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Pendidikan Sejarah STIKIP PGRI Sumatera Barat, 2012).

<sup>21</sup> Sagimun M.D, *Perkembangan Penulisan Biografi di Indonesia dalam Pemikiran Biografi dan Sejarah Suatu Prasarana dalam Berbagai Lokarya*, (Jakarta: Depdikbud, 1988), Hlm. 233-234.

aktivitas seseorang dalam waktu tertentu, tanpa mengabaikan hubungan tokoh tersebut dengan perkembangan zaman dan lingkungannya.<sup>22</sup>

Secara teoritis ada tiga bentuk biografi, yaitu biografi interpretatif, biografi populer, biografi sumber. Biografi interpretatif adalah biografi yang selain memperhatikan keseimbangan dalam hal watak, tindakan, perbuatan dan zamannya, juga menganalisa sumber-sumber sejarah. Biografi populer biasanya ditulis dengan pertimbangan komersial agar lekas laku di pasaran dan biografi ini tidak selalu mementingkan kebenaran ilmiah, berbagai gaya retorika dipergunakan untuk menjadikan tokoh itu menarik. Sedangkan biografi sumber adalah biografi pertama yang pernah ditulis mengenai seorang tokoh.<sup>23</sup>

Perbandingan dari jenis-jenis biografi tersebut, maka penulisan biografi interpretatif dianggap lebih cocok dilakukan dalam mengkaji biografi Leli Arni. Hal ini disebabkan bahwa dalam penulisan biografi ini lebih mementingkan dan memperhatikan watak, tindakan dan perbuatan dari sang tokoh yang ditulis termasuk menganalisa sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan perjuangan dan pengabdian tokoh tersebut.

Penulisan ini termasuk ke dalam penulisan karena biografi adalah menelusuri riwayat hidup tokoh. Pembagian Biografi dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu berdasarkan susunan dan waktu (kronologis), berdasarkan susunan urutan topik (tematis) dan didasarkan pada kombinasi keduanya.<sup>24</sup> Dalam penulisan Biografi

---

<sup>22</sup>Taufik Abdullah, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah : Sebuah Pengantar Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LP3S, 1978), Hlm. 2.

<sup>23</sup>R.Z. Leirissa, *Segi-Segi Praktis Penulisan Biografi Tokoh dalam pemikiran Biografi Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokakarya Jilid III*. (Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, PIDSN, 1984), Hlm. 98.

<sup>24</sup>Abdurrahman Surjomihardjo, *Menulis Riwayat Hidup, Dalam Pemikiran Biografi dan Kesejahteraan: Suatu Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokalkarya* (Jakarta: Dekdikbud, 1983) Hlm. 71.

Leli Arni didasarkan berdasarkan susunan urutan topik (tematis). Sebagai biografi tematis penulisan biografi Leli Arni ini memfokuskan pada masa Leli Arni menjadi panitia Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung(BP2KSS) hingga Leli Arni di masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil terjun ke dunia politik.

Pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Tuntutan masyarakat untuk melakukan pemekaran melalui pemerintahan daerah dipicu *euphoria* politik dan tuntutan keinginan masyarakat untuk mendirikan daerah sendiri dengan alasan mereka kurang di perhatikan. Padahal ini dapat disebabkan oleh kesalahan atau ketidak mampuan pelayanan birokrasi tingkat daerah. Dari penjelasan tersebut terlibatnya Leli Arni dalam kepanitiaan badan persiapan pemekaran atas dasar keinginan diri sendiri dan harapan masyarakat yang ada di wilayah selatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Partisipasi politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi.<sup>25</sup> Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan salah satunya perempuan berhak

---

<sup>25</sup>Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi Volume 9, No, 2, Juni 2012*.

untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi dan perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Minangkabau di masa lalu pernah disebut negeri perempuan. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya menganut sistem matrilineal. Artinya sistem sosial Minangkabau menjamin perlindungan perempuan secara terlembaga, baik secara sosial-ekonomi maupun politik keluarga. Ini misalnya tercermin dalam konsepsi pertalian darah menurut garis keturunan ibu, dan dalam kepemilikan harta pusaka yang juga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sistem sosial semacam itu, negeri perempuan ini mestinya membuat nasib kaum perempuan hidup lebih nyaman dan terjamin. Di sini kita juga bisa berharap lebih banyak lahir pemimpin dan tokoh perempuan ketimbang pada daerah lainnya.<sup>26</sup>

Supaya penulisan ini lebih terarah, maka konsep yang di pakai selanjutnya adalah konsep keterwakilan perempuan. Keberpihakan terhadap kaum perempuan juga ditunjukkan dengan amandemen UUD 1945 dan memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum dan pemerintahan. Bahkan, pada saat pembentukan draft amandemen UUD 1945 organisasi perempuan juga dilibatkan di bawah koordinasi komite perempuan untuk perdamaian dan demokrasi.<sup>27</sup> Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pasal 46, tentang Hak Asasi

---

<sup>26</sup>Mestiak Zed dan Armaidi Tanjung, Biografi Rangkayo HJ. Syamsidar Yahya (1914-1975), (Padang:UNP PRESS, 2011), Hlm. 1.

<sup>27</sup>Partini, "Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, (Vol, 1, No, 2, November 2012).

Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai pengumpulan data hingga penulisan.<sup>29</sup> Metode Penelitian Sejarah memiliki empat Tahap kegiatan yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi.

Tahap *pertama* heuristik, yaitu proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder. berupa dokumen-dokumen tertulis maupun lisan dari masa lampau sebagai sumber sejarah. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran terhadap beberapa dokumen-dokumen yang tersimpan pada arsip pribadi milik Leli Arni seperti ktp, ijazah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian wawancara dengan Leli Arni dan anggota keluarganya dan teman-teman sesama anggota BP2KSS, tokoh masyarakat, lawan politiknya. Pada pengumpulan sumber sekunder ialah dengan mencari buku-buku, Jurnal, makalah, Skripsi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Sumber tersebut didapat melalui studi pustaka dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan perpustakaan daerah Sumatera Barat. Sumber yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan di pisahkan sesuai dengan pembahasan antara bab sehingga mempermudah melanjutkan langkah-langkah selanjutnya.

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46

<sup>29</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm.

Setelah selesai dalam tahapan pengumpulan data maka akan masuk kepada tahap *kedua* tahapan kritik. Kritik adalah suatu usaha untuk mendapatkan jejak sumber yang benar dalam arti kata benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan penulisan sejarah yang disusun. Pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang mencari keaslian sumber sedangkan kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas kebiasaan untuk dipercaya atau tidak.<sup>30</sup>

Setelah data tersebut diuji melalui serangkaian kritik ekstern dan intern kemudian dilanjutkan dengan Tahap *ketiga* yaitu interpretasi. Interpretasi berarti penafsiran-penafsiran yang merujuk pada Fakta-Fakta yang dihasilkan. Fakta sejarah yang didefinisikan sebagai unsur yang dijabarkan langsung dari dokumen-dokumen sejarah yang sesuai dengan metode. Kemudian dikumpulkan kembali. Fakta itu kemudian diinterpretasikan untuk kemudian dituangkan kembali dalam penulisan Sejarah.

Tahap Selanjutnya adalah Tahap *keempat* yang terakhir dalam metode sejarah yaitunya sebuah penulisan atau historiografi Sejarah. Historiografi merupakan langkah perumusan cerita sejarah ilmiah, disusun secara logis menurut kronologis dan sistematis yang jelas dan mudah dimengerti.

---

<sup>30</sup> Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), Hlm. 62.